



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 23-K/PM.III-18/AL/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan secara *in absentia* dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IKHLAS SAMPURNA;**
Pangkat, NRP : KIs Pom, 127770;
Jabatan : Ur Hartib Denpom Lanal Aru;
Kesatuan : Lanal Aru;
Tempat, tanggal lahir : Kotabumi, 26 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Maya Jaya No. 250, RT. 02/RW. 02, Kel. Rejosari Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom Lanal Aru Nomor BPP-01/I-2/IX/2023 12 Oktober 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Aru selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/25/V/2024 tanggal 02 Mei 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor TAPKIM/23/PM.III-18/AL/V/2023 tanggal 07 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAPTERA/23/PM.III-18/AL/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5.
 - a. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/23/PM.III-18/AL/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Hari Sidang;
 - b. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/23/PM.III-18/AL/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Hari Sidang;
 - c. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/23/PM.III-18/AL/V/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-18/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghadapi di persidangan atas nama Terdakwa dan Para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan telah diregister dengan Nomor Reg 23-K/PM.III-18/AL/V/2024 tanggal 07 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian berkas perkara ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-01/I-1/III/2023/Pomal tanggal 18 Maret 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Tersangka tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom Lanal Aru.

Menimbang, bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa untuk menghadapi persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: R/263/V/2024 tanggal 14 Mei 2024;
2. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: R/314/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024;
3. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: R/279/VI/2024 tanggal 1 Juni 2024.

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Lanal Aru telah memberikan jawaban sebagaimana Surat Danlanal Aru Nomor: B/122/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, Nomor: B/149/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024 dan Nomor: B/182/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kls Pom I khas Sampurna, NRP 127770, Jabatan Ur Hartib Denpom Lanal Aru tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui keberadaan Terdakwa, untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan, bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan, Perkara tindak pidana

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-18/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan, penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dalam fungsinya sebagai alat pertahanan negara, namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tersebut, tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya, selain itu perkara desersi masuk dalam kategori delik jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan, "sederhana", adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien, sedangkan yang dimaksud dengan, "cepat", harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan system peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian yang berlarut-larut terhadap status perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi yang diputus secara *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-18/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, sehingga menurut Majelis Hakim dari SEMA Nomor 5 Tahun 2021 ini memberikan penafsiran bahwa perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan tidak terikat pada batasan garis waktu 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapat disidangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, bahkan dengan adanya batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dapat disidangkan setiap saat setelah 1 (satu) bulan berkas perkara dilimpahkan di pengadilan dan sudah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali serta harus sudah diputus perkaranya sebelum waktu 5 (lima) bulan sejak berkas perkaranya dilimpahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dihubungkan dengan perkara ini, dimana Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan tidak diketahui keberadaan Terdakwa, hal ini yang dikuatkan dengan surat dari Danlanal Aru selaku Komandan Satuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan:

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-18/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AL.
- c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa surat: 4 (empat) lembar Daftar Absensi Pers Lanal Aru yang didalamnya termasuk nama Terdakwa KIs Pom Ikhlas Sampurna, NRP 127770, periode bulan Februari 2023 s.d. bulan Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dandenspom Lanal Aru Kapten Laut (PM) A. Nurfadillah, NRP 21051/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Enam belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer pada hari Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Malanal Aru Kab. Kepulauan Aru Provinsi Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di Lanal Aru, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Lanal Aru dengan pangkat KIs Pom NRP 127770;
- b. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa melaksanakan Cuti Tahunan Tahun 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 dan seharusnya sudah kembali melaksanakan apel pagi pada tanggal 16 Februari 2023 namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Lanal Aru, hal tersebut diketahui oleh Serka Bah Yanuaris Sormudi (Saksi-1) dan Peltu Pom Nofrialdi (Saksi-2);

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-18/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 181/2023 Saksi-2 bersama rekan-rekan Lanal Aru berkoordinasi dengan Lanal Lampung untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Jl. Maya Jaya No. 250, RT. 02/RW. 02 Kel. Rejosari, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara namun Terdakwa tidak berada di rumahnya dan keluarga Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa sedang melaksanakan Cuti Tahunan selanjutnya pihak Kesatuan Lanal Aru berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering didatanginya namun Terdakwa tidak diketemukan hingga saat ini;

d. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer;

e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom Lanal Aru a.n. Ricky M. Sinaga, Serda Pom NRP. 131023, yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan TMT. 16 Februari 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Lanal Aru;

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer pada tanggal 02 Maret 2024, secara berturut-turut selama (Empat ratus empat puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa Para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana Surat Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: R/264/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, Nomor: R/315/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 dan Nomor: R/280/VI/2024 tanggal 1 Juni 2024 namun sampai persidangan ini Para Saksi tersebut tidak ada yang hadir di persidangan karena sedang melaksanakan Pengamanan Pulau Terluar di Desa Batu Goyang dan Desa Warabal Kec. Aru Selatan Timur, sebagaimana Surat Danlanal Aru Nomor: R/183/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi tersebut ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-18/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan diumumkan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 atas nama Serka Bah Yanuaris Sormud dan keterangan Saksi-2 atas nama Peltu Pom Nofrialdi yang tidak hadir di persidangan tersebut, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, oleh karena itu keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **YANUARIS SORMUD;**
Pangkat, NRP : Serka Bah, 87039;
Jabatan : Bama Satma;
Kesatuan : Lanal Aru;
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 19 September 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih, RT. 001/RW. 005, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Prov. Maluku.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2020 saat Terdakwa mulai berdinasi di Lanal Aru hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa melaksanakan Cuti Tahunan Tahun 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 dan seharusnya sudah kembali melaksanakan apel pagi pada tanggal 16 Februari 2023 namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Lanal Aru selanjutnya Pihak Kesatuan Lanal Aru berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya Jl. Maya Jaya No. 250, RT. 02/RW. 02 Kel. Rejosari, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara dan di tempat-tempat yang diduga sering didatanginya namun Terdakwa tidak diketemukan;
3. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-18/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2: mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **NOFRIALDI**;
Pangkat, NRP : Peltu Pom, 91488;
Jabatan : Ur. Lidkrim Denpom Lanal Aru;
Kesatuan : Lanal Aru;
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Balai Karimun, 06 November 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Mess Kemenpera Mako Lanal Aru.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2022 saat Saksi baru berdinan di Denpom Lanal Aru hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa melaksanakan Cuti Tahunan Tahun 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 dan seharusnya sudah kembali melaksanakan apel pagi pada tanggal 16 Februari 2023 namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Lanal Aru;
3. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 Saksi bersama rekan-rekan Lanal Aru berkoordinasi dengan Lanal Lampung untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Jl. Maya Jaya No. 250, RT. 02/RW. 02 Kel. Rejosari, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara namun Terdakwa tidak berada di sana dan keluarga Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa sedang melaksanakan Cuti Tahunan selanjutnya pihak Kesatuan Lanal Aru berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering didatanginya namun Terdakwa tidak diketemukan hingga saat ini;
4. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan keterangan karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Danlanal Aru Nomor: B/182/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 selaku Komandan Satuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa yang dilakukan oleh Penyidik Denpom Lanal Aru atas nama Ricky M. Sinaga, Serda Pom NRP. 131023, yang ditandatangani pada tanggal 12 September

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-18/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023, telah dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di Lanal Aru, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Lanal Aru dengan pangkat Kls Pom NRP 127770;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 16 Februari 2023 dan sampai dengan diadakan pemeriksaan di persidangan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, maka dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat: 4 (empat) lembar Daftar Absensi Pers Lanal Aru yang didalamnya termasuk nama Terdakwa Kls Pom Ikhlas Sampurna, NRP 127770, periode bulan Februari 2023 s.d. bulan Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dandepom Lanal Aru Kapten Laut (PM) A. Nurfadillah, NRP 21051/P.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa daftar absensi tersebut menunjukkan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Lanal Aru sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, secara berturut-turut atau selama 44 (empat puluh empat) hari, selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi ditulis TK yang berarti Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa seijin dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang. Daftar Absensi tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya sejak semula sudah melarikan diri sampai dengan perkaranya disidangkan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak kapan dimulai dan sampai kapan perbuatannya berhenti, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat, yaitu:

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-18/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik;

- b. Ada yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) atau setidaknya sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer;
- c. Ada juga yang pendapat lain bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilaporkan ke Denpom Lanal Aru sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-01/I-1/III/2023/ Pomal tanggal 18 Maret 2023, artinya sejak dilaporkan tersebut jangka waktu lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan terhenti, sehingga dalam perkara ini Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, namun demikian dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya sejak semula sudah melarikan diri sampai dengan perkaranya disidangkan terhadap diri Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk kembali ke kesatuan dan hadir di persidangan sampai pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut diperiksa dan diputus, oleh karena itu dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir terhentinya masa desersi adalah sampai dengan perkara tersebut diputus oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Lanal Aru, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Lanal Aru dengan pangkat KIs Pom NRP 127770;
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI;
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-18/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa melaksanakan Cuti Tahunan Tahun 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 dan seharusnya sudah kembali melaksanakan apel pagi pada tanggal 16 Februari 2023 namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Lanal Aru;

5. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2023 Saksi-2 bersama rekan-rekan Lanal Aru berkoordinasi dengan Lanal Lampung untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Jl. Maya Jaya No. 250, RT, 02/RW. 02, Kel. Rejosari, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara namun Terdakwa tidak berada di rumahnya dan keluarga Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa sedang melaksanakan Cuti Tahunan selanjutnya pihak Kesatuan Lanal Aru berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering didatanginya namun Terdakwa tidak diketemukan;

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan;

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan;

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer;

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan diputus pada tanggal 18 Juli 2024 atau selama 519 (lima ratus sembilan belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

10. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas/kesatuan harus ada izin yang sah dari Komandan Satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi, aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa;

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *jo* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinastis di Lanal Aru, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Lanal Aru dengan pangkat Kls Pom NRP 127770;
- b. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AL aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI;
- c. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena salahnya atau dengan sengaja), Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih unsur pidana mana yang paling tepat dan berkesesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud, "Karena salahnya", berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa yang dimaksud, "Dengan sengaja", adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan/penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MvT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud, "Tidak hadir", adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-18/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud "T-gopid izin", artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2023 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang;
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan;
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan;
- d. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas/kesatuan harus ada ijin yang sah dari Komandan Satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi, aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian, "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian, "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian, "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan, "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian, "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-18/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu perang, keadaan penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas Operasi Militer, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada dalam, "Waktu damai".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2023 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang sehingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom Lanal Aru sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-01/I-1/III/2023/ Pomal tanggal 18 Maret 2023;
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada perhitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadiran itu harus lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada tanggal 16 Februari 2023 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang;

b. Bahwa benar selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom Lanal Tual sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-01/I-1/III/2023/ Pomal tanggal 18 Maret 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan diputus pada tanggal 18 Juli 2024 atau selama 519 (lima ratus sembilan belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu, "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-18/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang mencerminkan Terdakwa adalah seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi serta bermental yang rendah, menunjukkan sikap egoisme yang berlebihan serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria;
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sudah mengetahui perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil jalan pintas untuk meraih suatu maksud dan menghindari tanggungjawab dengan cara mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya;
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa kurang mampu menghayati nilai-nilai luhur Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta rendahnya nilai kedisiplinan pada diri Terdakwa yang sepatutnya harus patuh dan taat kepada setiap perintah atasan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum saja, tetapi keadilan dan kemanfaatan juga merupakan tujuan dari suatu putusan sehingga harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan;
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI;
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
4. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-18/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak diketemukan karena sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak hadir dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan serta memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatas Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bagi seorang prajurit TNI dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) huruf-b *juncto* Ayat (2) huruf-f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit, seorang Prajurit TNI dapat dipisahkan melalui pemberhentian dengan tidak hormat karena melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut secara administratifpun dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak layak dan dapat merugikan disiplin prajurit;
3. Bahwa dengan memperhatikan lamanya waktu sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan Terdakwa belum kembali ke kesatuan tersebut, telah membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan juga agar perbuatannya tidak ditiru oleh Prajurit yang lain, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-18/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan dengan pertimbangan ini pula sekaligus Majelis Hakim mengabulkan permohonan penjatuhan pidana tambahan dari Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat: 4 (empat) lembar Daftar Absensi Pers Lanal Aru yang didalamnya termasuk nama Terdakwa KIs Pom Ikhlas Sampurna, NRP 127770, periode bulan Februari 2023 s.d. bulan Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dandepom Lanal Aru Kapten Laut (PM) A. Nurfadillah, NRP 21051/P.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Ikhlas Sampurna**, Pangkat KIs Pom, NRP 127770, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat: 4 (empat) lembar Daftar Absensi Pers Lanal Aru yang didalamnya termasuk nama Terdakwa KIs Pom Ikhlas Sampurna, NRP 127770, periode bulan Februari 2023 s.d. bulan Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dandepom Lanal Aru Kapten Laut (PM) A. Nurfadillah, NRP 21051/P, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980030460874 sebagai Hakim Ketua Majelis serta Magdial, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11030010440578 dan Samsul Hadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Onggeleng E. Bogani, S.H., M.Sc., Letkol Chk NRP 2920105760271, Panitera Pengganti Juspindeli Girsang, S.H., Lettu Chk NRP 21010017470281 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Magdial, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11030010440578

R. Ach Agus Purno Wijoyo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980030460874

Ttd

Samsul Hadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Panitera Pengganti

Ttd

Juspindeli Girsang, S.H.
Lettu Chk NRP 21010017470281